

KH. Ahmad Dahlan Dan Perserikatan Muhammadiyah: Revolusi Dalam Bidang Pendidikan Islam

¹ Fahruruddin, ² Syamsuddin, ³ Hasyim Haddade

¹ Universitas Nggusuwaru Bima, Jl. Piere Tendean kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima

^{2,3} Universitas Alauddin Negeri Makassar, Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Kabupaten Gowa

*Corresponding Author e-mail: bangfenmbozo@gmail.com

Received: May 2026; Revised: June 2026; Published: July 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan karakter pendidikan Islam pada masa klasik dan modern, serta merumuskan model sintesis yang integratif dalam rangka memperkuat sistem pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis komparatif terhadap literatur ilmiah periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik menekankan pembentukan karakter moral dan spiritual melalui pendekatan halaqah, dialog keilmuan, serta internalisasi nilai akhlak, sedangkan pendidikan Islam modern berorientasi pada pengembangan kompetensi, integrasi ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Perbedaan paradigmatis ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai klasik dengan pendekatan modern dapat menghasilkan model pendidikan Islam yang lebih holistik, adaptif, dan kontekstual. Meskipun memiliki perbedaan paradigmatis, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan pembentukan manusia yang beriman dan berilmu. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara nilai-nilai klasik, konvensional dan pendekatan modern dapat menghasilkan model pendidikan Islam yang lebih holistik, adaptif, dan kontekstual. Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada perumusan kerangka konseptual pendidikan Islam integratif yang dapat dijadikan dasar pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan pada penelitian pendidikan Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka konseptual pendidikan Islam integratif yang dapat dijadikan dasar pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan pada penelitian pendidikan Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Klasik, Modern, Integrasi, Karakter, Kurikulum

KH. Ahmad Dahlan and the Muhammadiyah Movement: A Revolution in Islamic Education

Abstract

This study aims to analyze and compare the characteristics of Islamic education in classical and modern periods, as well as to formulate an integrative synthesis model to strengthen Islamic education systems in response to contemporary challenges. This study employs a qualitative approach using library research and comparative analysis of scholarly literature published between 2020 and 2025. The findings reveal that classical Islamic education emphasizes moral and spiritual development through halaqah, scholarly dialogue, and the internalization of ethical values, while modern Islamic education focuses on competency development, integration of general sciences, and the use of technology in learning processes. This paradigmatic difference suggests that integrating classical values with modern educational approaches can produce a more holistic, adaptive, and contextually relevant Islamic education model. Despite their paradigmatic differences, both models share a common goal of forming individuals who are both knowledgeable and faithful. The study concludes that integrating classical values with modern educational approaches can produce a more holistic, adaptive, and contextually relevant Islamic education model. The practical contribution of this research lies in proposing a conceptual framework for integrative Islamic education that can serve as a foundation for curriculum development, instructional strategies, and educational policy. The main contribution of this research lies in proposing a conceptual framework for integrative Islamic education that can serve as a foundation for curriculum development, instructional strategies, and educational policy.

Keywords: Islamic education, classical, modern, integration, character, curriculum.

How to Cite: Fahruruddin, Syamsuddin, & Haddade, H. (2026). KH. Ahmad Dahlan and Muhammadiyah: A revolution in Islamic education. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 5672–5691. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.5948>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.5948>

Copyright© 2026, Fahruruddin et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam modern (Akhyar & Kosim, 2024). Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis serta penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman (Darwis et al., 2024).

Pada awal abad ke-20, kondisi umat Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya praktik taklid, serta kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Sistem pendidikan saat itu terpisah antara pendidikan agama (pesantren) dan pendidikan umum (sekolah kolonial), sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pembentukan sumber daya manusia yang utuh (Ihsan et al., 2024).

Melihat kondisi tersebut, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk melakukan pembaruan (tajdid) dalam kehidupan beragama, termasuk dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah berupaya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem pendidikan yang lebih modern dan terstruktur (Ahmad, 2025).

Dalam praktiknya, Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang menggabungkan kurikulum agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan umat Islam (Halik et al., 2024).

Pengaruh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan Islam sangat signifikan, terutama dalam memperkenalkan sistem pendidikan modern yang terorganisir, penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif, serta penanaman nilai-nilai Islam yang rasional dan progresif (Marsudi & Zayadi, 2021). Hingga saat ini, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Suliyanto et al., 2023).

Muhammad Darwis lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, sebagai putra dari KH. Abu Bakar, seorang imam dan khatib Masjid Gedhe Kesultanan Yogyakarta (Hadikusuma, 1980). Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan keagamaan yang kuat dan mendapat bimbingan langsung dari para ulama lokal yang terkemuka.

Pendidikan awalnya ditempuh di lingkungan pesantren tradisional, di mana ia mempelajari ilmu-ilmu Islam klasik (al-'ulum al-diniyyah) seperti fikih, tafsir, hadis, nahwu, dan sharaf (Ali, 1987). Para ulama yang membimbingnya antara lain KH. Muhammad Shalih, KH. Muhsin, dan beberapa kiai terkemuka di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya (Shihab, 1998). Sistem pendidikan pesantren pada masa itu menggunakan metode sorogan (santri membaca, kiai menyimak) dan bandongan (kiai membaca, santri menyimak), yang menitikberatkan pada penghafalan teks dan kepatuhan terhadap kitab kuning (al-kutub al-safra) (Bruinessen, 1995). Meskipun sistem ini kokoh dalam membentuk landasan keagamaan, Muhammad Darwis muda mulai merasakan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang ia pelajari dengan praktik keagamaan masyarakat yang sarat dengan tradisi lokal (adat) yang bercampur dengan takhayul dan bid'ah (Kuntowijoyo, 2008).

Titik balik terpenting dalam perjalanan intelektual Muhammad Darwis terjadi ketika ia berangkat ke Makkah untuk pertama kalinya sekitar tahun 1890 dan menetap selama kurang lebih lima tahun (Noer, 1980). Pengalaman di Tanah Suci ini jauh melampaui sekadar ibadah haji – ia menjadi arena perjumpaan ide-ide besar yang sedang bergolak di dunia Islam.

Di Makkah dan melalui jaringan intelektual Islam internasional, Muhammad Darwis bersentuhan dengan pemikiran Muhammad Abduh (1849–1905), ulama dan pembaru Islam asal Mesir yang merupakan murid utama Jamaluddin al-Afghani. Abduh berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh dua hal utama: taklid buta (taqlid) terhadap mazhab tanpa memahami dasarnya, dan keterbelakangan umat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan modern (Hourani, 1983).

Melalui majalah Al-'Urwah al-Wuthqa dan kemudian Al-Manar yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha – murid Abduh – gagasan-gagasan pembaruan Islam ini menyebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam, termasuk ke kalangan jemaah haji asal Hindia Belanda (Mohammad, 2006). Muhammad Darwis termasuk salah satu yang aktif membaca dan menyerap pemikiran-pemikiran ini. Selain Abduh, pemikiran Jamaluddin al-Afghani (1838–1897) juga memberikan pengaruh signifikan. Al-Afghani adalah tokoh Pan-Islamisme yang bersemangat membangkitkan solidaritas umat Islam menghadapi kolonialisme Barat (Keddie, 1973). Ia menekankan pentingnya ijtihad (penalaran hukum Islam secara mandiri) sebagai senjata intelektual umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman (Sholihin, 2025).

Al-Afghani juga menegaskan bahwa Islam sejatinya tidaklah bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan modern – justru sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk berpikir rasional dan maju (Sholihin, 2025). Pemikiran inilah yang meresap dalam benak Muhammad Darwis dan membentuk keyakinannya bahwa pembaruan Islam bukan sekadar mungkin, tetapi merupakan kewajiban. Di Makkah, Muhammad Darwis juga bergabung dalam lingkaran Jawi – komunitas ulama dan pelajar dari Nusantara yang menetap di sana (Azra, 1994). Ia belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama asal Minangkabau yang menjadi imam dan guru besar di Masjidil Haram (Amrullah, 1982). Meski Syekh Ahmad Khatib sendiri bersikap kritis terhadap sebagian pembaruan Wahabi, ia tetap membuka wawasan Muhammad Darwis tentang pentingnya kajian Islam yang lebih ketat dan bersih dari sinkretisme (Noer, 1980).

Ketika kembali ke Yogyakarta, Muhammad Darwis – yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ahmad Dahlan – membawa pulang bukan sekadar pengalaman spiritual, melainkan sebuah visi besar yang revolusioner (Salam, 1963 dalam Aritonang et al., 2025). Ahmad Dahlan meyakini bahwa akar masalah kemunduran umat Islam Indonesia terletak pada cara berpikir yang statis dan tertutup. Ia menentang keras taqlid buta dan mendorong umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis secara langsung (al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah) (Muhammadiyah, 2005). Ia mulai mengajarkan tafsir Al-Qur'an secara langsung kepada masyarakat – sebuah praktik yang pada masanya dianggap cukup berani karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang hanya menerima ajaran dari kiai secara hierarkis (Nakamura, 1983). Ahmad Dahlan juga memperkenalkan

pendekatan rasional dalam memahami ajaran Islam, mengajarkan bahwa iman yang benar harus dilandasi oleh pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan (Maarif, 1985).

Di bidang praktik keagamaan, Ahmad Dahlan berjuang keras untuk membersihkan Islam dari unsur-unsur syirik, bid'ah, dan khurafat yang telah bercampur baur dengan tradisi Jawa (Alfian, 1989). Ia juga melakukan koreksi terhadap arah kiblat Masjid Gedhe Kauman yang ia temukan tidak tepat menunjuk ke Makkah – sebuah tindakan yang pada awalnya menuai penolakan keras dari masyarakat (Hadikusuma, 1980). Lebih dari itu, visi pembaruan Ahmad Dahlan bersifat holistik. Ia percaya bahwa kemajuan umat Islam harus mencakup bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi – bukan hanya ritual keagamaan semata (Yusuf, 1990). Dari sinilah lahir cikal bakal Muhammadiyah yang ia dirikan pada 18 November 1912, organisasi yang hingga hari ini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia (Nashir, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis komparatif (Sari et al., 2026). Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan Islam yang sangat relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi sumber pustaka yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur, sementara analisis historis digunakan untuk memahami perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam dimensi waktu. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Validitas data dilakukan melalui triangulasi dari berbagai sumber data untuk memastikan keabsahan informasi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelahiran Muhammadiyah 1912

Tanggal 18 November 1912 menjadi salah satu tonggak paling bersejarah dalam perjalanan Islam di Indonesia. Pada hari itu, di sebuah rumah sederhana di Kampung Kauman, Yogyakarta, Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi yang ia beri nama Muhammadiyah – sebuah nama yang berakar dari kata Muhammad, merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, dengan akhiran Arab-iyah yang berarti "pengikut" atau "yang berkaitan dengan" (Nashir, 2010). Lahirnya Muhammadiyah bukan sekadar peristiwa organisatoris biasa, melainkan merupakan perwujudan nyata dari visi besar pembaruan Islam yang telah lama diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan sejak kepulangannya dari Makkah.

Keputusan Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi formal dilatarbelakangi oleh kesadaran mendalam bahwa pembaruan Islam tidak bisa dilakukan secara perseorangan. Ia telah menyaksikan sendiri betapa dakwah individualnya – mulai dari meluruskan arah kiblat, mengajarkan tafsir Al-Qur'an

secara langsung, hingga mendirikan sekolah — selalu menghadapi tembok penolakan dari masyarakat yang terbiasa dengan tradisi yang mapan (Noer, 1980).

Lebih dari itu, Ahmad Dahlan melihat bahwa umat Islam di Hindia Belanda sedang menghadapi ancaman yang bersifat struktural: kolonialisme Belanda yang semakin menggurita, misi Kristenisasi yang terorganisasi dengan rapi, dan sistem pendidikan modern (sekolah Belanda) yang hanya terbuka bagi kalangan tertentu sementara umat Islam terpinggirkan (Alfian, 1989). Menghadapi realitas ini, dibutuhkan sebuah wadah kolektif yang terorganisir dan memiliki program kerja yang sistematis.

Semboyan utama Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah* — kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Muhammadiyah, 2005). Prinsip ini mengandung dua dimensi penting:

- Pertama, dimensi teologis-normatif, yakni menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sahih sebagai sumber utama dan tertinggi dalam segala aspek kehidupan keagamaan. Ahmad Dahlan dan para pengikutnya menolak praktik taqlid buta kepada mazhab tertentu dan mendorong dilakukannya ijtihad dalam memahami ajaran Islam sesuai tuntutan zaman (Maarif, 1985).
- Kedua, dimensi purifikatif, yakni membersihkan praktik keagamaan umat Islam dari unsur-unsur syirik (menyekutukan Allah), bid'ah (inovasi dalam ibadah yang tidak berdasar), dan khurafat (kepercayaan yang tidak rasional) yang telah bercampur baur dengan tradisi lokal Jawa selama berabad-abad. Namun, penting dicatat bahwa Muhammadiyah dalam hal ini berbeda dengan gerakan Wahabisme — ia tidak bersikap keras dan eksklusif, melainkan mengedepankan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan gradual (Azra, 1996).

Visi Muhammadiyah: Islam yang Berkemajuan, Cerdas, dan Berorientasi Amal Sosial

a. Islam Berkemajuan (*al-Islam al-Taqqaddumi*)

Salah satu konsep paling orisinal yang diusung Muhammadiyah adalah gagasan tentang Islam berkemajuan (Islam yang maju). Konsep ini berangkat dari keyakinan Ahmad Dahlan bahwa Islam bukanlah agama yang statis dan antikemajuan (Nashir, 2013). Sebaliknya, Al-Qur'an sendiri penuh dengan ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memanfaatkan akal dalam memahami semesta — *afala ta'qilun* (tidakkah kamu berpikir?) (Kuntowijoyo, 2008).

Islam berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah berarti umat Islam harus mampu merespons tantangan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental ajaran agama. Ini mencakup keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan sistem organisasi yang efisien — selama semua itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam (Mulkhan et al., 1990). Inilah mengapa Muhammadiyah dengan berani mengadopsi model sekolah modern dari Belanda, namun mengisinya dengan kurikulum yang bernapaskan Islam.

b. Islam yang Cerdas: Pendidikan sebagai Pilar Utama

Ahmad Dahlan sangat meyakini bahwa kejahilan (kebodohan) adalah musuh terbesar umat Islam (Hadikusuma, 1980). Oleh karena itu, pendidikan menjadi pilar pertama dan paling kokoh dari visi Muhammadiyah. Ia mendirikan sekolah-sekolah yang menerapkan sistem pendidikan modern — dengan kelas, papan tulis, bangku, dan jadwal pelajaran yang terstruktur — sebuah revolusi dalam dunia pendidikan Islam Indonesia (Nakamura, 1983).

Yang lebih revolusioner lagi, Ahmad Dahlan membuka sekolah tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Pada tahun 1914, istri Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah), mendirikan organisasi perempuan pertama dalam Muhammadiyah yang kemudian berkembang menjadi 'Aisyiyah pada tahun 1917. Langkah ini merupakan terobosan luar biasa di tengah masyarakat yang masih sangat membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik.

Kurikulum sekolah Muhammadiyah dirancang secara integratif: menggabungkan ilmu-ilmu agama (al-'ulum al-diniyyah) seperti tafsir, fikih, dan akidah dengan ilmu-ilmu umum (al-'ulum al-'ammah) seperti matematika, ilmu alam, bahasa, dan sejarah (Mulkhan et al., 1990). Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya melahirkan generasi Muslim yang alim (berilmu agama) sekaligus cerdas dalam menghadapi tantangan dunia modern.

c. Berorientasi pada Amal Sosial: Islam sebagai Gerakan Kemanusiaan

Dimensi ketiga dan mungkin yang paling membedakan Muhammadiyah dari organisasi keagamaan lainnya pada masa itu adalah orientasi kuatnya pada amal sosial. Ahmad Dahlan terinspirasi secara mendalam oleh Surah Al-Ma'un (QS. 107), yang mengecam keras orang-orang yang menganggap dirinya beragama namun tidak peduli kepada orang miskin dan anak yatim (Yusuf, 1990). Ia mengajarkan bahwa keberagamaan yang sejati harus terwujud dalam tindakan nyata membantu sesama. Manifestasi konkret dari visi amal sosial ini dapat dilihat dalam berbagai program yang diinisiasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya:

Bidang Kesehatan: Muhammadiyah mendirikan klinik dan rumah sakit yang terbuka untuk semua kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama (Alfian, 1989). PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang didirikan pada 1923 menjadi cikal bakal jaringan rumah sakit Muhammadiyah yang kini tersebar di seluruh Indonesia (Muhammadiyah, 2010).

Bidang Sosial-Kemanusiaan: Muhammadiyah mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan terlantar, serta lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada fakir miskin (Noer, 1980). Ini merupakan implementasi langsung dari pesan Al-Ma'un yang menjadi ruh gerakan sosial Muhammadiyah.

Bidang Dakwah Terorganisir: Berbeda dengan dakwah tradisional yang bersifat informal dan personal, Muhammadiyah mengembangkan sistem dakwah yang terstruktur, dengan kurikulum, materi, dan metode yang dirancang secara sistematis untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Nashir, 2013).

Tantangan Pendidikan Zaman Itu: Islam Menghadapi Arus Modernisasi

Memasuki abad ke-20, umat Islam di Hindia Belanda menghadapi sebuah krisis pendidikan yang bersifat struktural dan multidimensional. Di satu sisi, sistem pendidikan Islam tradisional yang telah berjalan selama berabad-abad mulai menunjukkan ketidakmampuannya merespons tantangan zaman yang berubah dengan cepat. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda membangun sistem pendidikan modern yang — meskipun relatif maju secara metode dan kurikulum — dirancang bukan untuk memajukan pribumi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial (Noer, 1980). Di antara dua kutub inilah umat Islam terjebak dalam sebuah dilema historis yang menentukan nasib mereka selama puluhan tahun ke depan.

a. Sistem Pendidikan Tradisional yang Terisolasi dari Perkembangan Zaman

1) Gambaran Umum Pendidikan Islam Tradisional

Jauh sebelum kedatangan Belanda, pendidikan Islam di Nusantara telah memiliki tradisinya sendiri yang kuat. Lembaga pendidikan utama umat Islam adalah pesantren – sebuah institusi yang menempatkan seorang kiai sebagai figur sentral otoritas keilmuan dan moral, dikelilingi oleh para santri yang tinggal di asrama (pondok) dan belajar secara intensif (Bruinessen, 1995). Di wilayah perkotaan dan pinggiran kota, terdapat pula surau (di Minangkabau dan Melayu) serta langgar dan madrasah informal yang mengajarkan baca tulis Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama dasar (Azra, 1999).

2) Metode Pembelajaran yang Statis

Metode utama yang digunakan dalam pesantren tradisional adalah sorogan dan bandongan. Dalam sistem sorogan, santri membaca teks di hadapan kiai yang kemudian memberikan koreksi dan keterangan. Dalam sistem bandongan atau wetonan, kiai membacakan teks kitab kuning secara kolektif sementara para santri mendengarkan dan mencatat terjemahan di pinggir kitab masing-masing (Azra, 1999).

Kedua metode ini memiliki kelemahan fundamental: ia bersifat sangat bergantung pada otoritas tunggal sang kiai, tidak mendorong santri untuk berpikir kritis dan mandiri, serta tidak memberikan ruang bagi eksplorasi intelektual di luar batas-batas teks yang telah ditetapkan. Budaya taqlid – mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mempertanyakannya – sangat kuat tertanam, sehingga inovasi dalam pemahaman keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan tercela (Maarif, 1985).

3) Kurikulum yang Tidak Relevan dengan Tuntutan Zaman

Kurikulum pesantren tradisional hampir seluruhnya berfokus pada ilmu-ilmu agama klasik: fikih (hukum Islam), nahwu-sharaf (tata bahasa Arab), tafsir, hadis, tauhid, dan tasawuf (Bruinessen, 1995). Tidak ada pelajaran matematika, ilmu alam, geografi, sejarah, atau bahasa-bahasa modern yang pada masa itu semakin penting untuk dikuasai dalam menghadapi realitas kehidupan di bawah kolonialisme.

Akibatnya, lulusan pesantren – betapapun alim dalam ilmu agama – hampir tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dalam ranah profesional modern, mengakses jabatan-jabatan pemerintahan, atau bahkan memahami hukum-hukum kolonial yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari (Steenbrink, 1992). Mereka terisolasi bukan hanya secara geografis di pelosok desa, tetapi juga secara intelektual dari arus perkembangan peradaban yang sedang bergerak di luar tembok pesantren.

4) Ketidadaan Sistem dan Manajemen Kelembagaan

Pesantren tradisional umumnya tidak memiliki sistem administrasi yang teratur, kurikulum yang terstandar, atau jenjang pendidikan yang jelas. Lama belajar seorang santri sangat bergantung pada penilaian subjektif kiai dan kemampuan finansial keluarga santri. Tidak ada ijazah formal, tidak ada penanda pencapaian yang diakui secara luas, dan tidak ada mekanisme evaluasi yang sistematis.

Keadaan ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda, yang memiliki kurikulum terstandar, jadwal pelajaran yang teratur, sistem ujian, dan ijazah yang diakui secara formal dan memberikan akses kepada lapangan pekerjaan tertentu (Noer, 1980).

b. Implikasi Ilmiah dan Praktis

1) Politik Pendidikan Kolonial Belanda

Pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya mengabaikan bidang pendidikan bagi pribumi. Melalui Politik Etis (*Ethische Politiek*) yang dicanangkan secara resmi pada tahun 1901 – sebagian karena tekanan dari kalangan humanis Belanda seperti Conrad van Deventer yang berpendapat bahwa Belanda memiliki "hutang kehormatan" (*eereschuld*) kepada rakyat jajahannya – pemerintah Belanda mulai memperluas akses pendidikan formal bagi penduduk pribumi (Kartodirdjo, 1990).

Namun perlu dipahami bahwa motif utama di balik kebijakan ini bukanlah ketulusan altruistik. Ekspansi pendidikan kolonial lebih didorong oleh kebutuhan praktis pemerintah Belanda akan tenaga-tenaga administrasi tingkat menengah yang melek huruf, mampu berbahasa Belanda, dan dapat dipercaya untuk mengelola birokrasi kolonial yang semakin kompleks (Gouda, 1995). Dengan kata lain, sekolah Belanda dirancang untuk menciptakan birokrat pribumi, bukan pemimpin bangsa.

2) Hierarki Sekolah Kolonial dan Diskriminasi Sistematis

Sistem persekolahan kolonial dibangun di atas fondasi diskriminasi rasial yang eksplisit. Pada puncak hierarki terdapat ELS (*Europeesche Lagere School*) – sekolah dasar untuk anak-anak Eropa yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan memberikan akses kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Van der Wal, 1998).

Di bawahnya terdapat HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*) yang didirikan pada 1914, yakni sekolah dasar untuk anak-anak "pribumi" kalangan atas yang menggunakan bahasa Belanda. Sementara untuk kalangan pribumi biasa, tersedia *Volksschool* (sekolah rakyat) dengan bahasa pengantar bahasa daerah, kurikulum yang sangat terbatas, dan fasilitas yang jauh lebih miskin. Sekolah rakyat ini hanya memberikan pendidikan tiga tahun dan tidak membuka akses kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Akibatnya, anak-anak dari keluarga Muslim biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Mereka harus memilih antara pesantren yang tidak relevan dengan tuntutan modern dan sekolah *Volksschool* yang berkualitas rendah dan tidak memberikan prospek masa depan yang cerah (Alfian, 1989).

3) Eksklusivitas Sekolah Kolonial

Selain hambatan rasial, ada juga hambatan finansial yang sangat nyata. Biaya pendidikan di sekolah-sekolah kolonial yang berkualitas baik jauh melampaui kemampuan rata-rata keluarga Muslim Indonesia, yang umumnya bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau pengrajin. Sementara pesantren memang relatif lebih terjangkau – bahkan banyak yang hampir tidak memungut biaya – namun, seperti telah dibahas, ia tidak mampu menyiapkan santrinya untuk menghadapi realitas dunia modern.

Pemerintah kolonial juga secara aktif membatasi akses umat Islam kepada pendidikan tinggi. Hingga awal abad ke-20, hampir tidak ada institusi pendidikan tinggi yang terbuka secara luas bagi pribumi, apalagi bagi umat Islam.²⁰ Sekolah dokter STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) yang didirikan pada 1851 dan Sekolah Hukum yang berdiri kemudian adalah pengecualian langka, bukan standar umum.

4) Dampak Ketimpangan: Lahirnya Dua Kelas Masyarakat

Ketimpangan yang sistematis ini pada akhirnya melahirkan dua kelas dalam masyarakat pribumi yang semakin jauh jaraknya. Di satu sisi, terdapat kelompok kecil kaum terpelajar (priyayi) yang mengenyam pendidikan Barat dan bekerja dalam sistem kolonial. Di sisi lain, terdapat massa besar umat Islam yang terpinggirkan dari akses terhadap pengetahuan dan kekuasaan.

Tokoh-tokoh seperti Snouck Hurgronje — penasihat urusan pribumi pemerintah Belanda — bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Islam yang "fanatik" adalah ancaman bagi stabilitas kolonial, sementara Islam yang "moderat" dan terpelajar secara Barat dapat menjadi mitra yang berguna. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya marginalisasi sistematis terhadap pendidikan Islam tradisional.

Kebutuhan Mendesak akan Pendidikan yang Menghidupkan, Mencerdaskan, dan Membebaskan

1) Dimensi "Menghidupkan": Pendidikan sebagai Napas Peradaban

Ahmad Dahlan dan para pembaru Islam lainnya melihat bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis atas sistem pendidikan yang ada, melainkan sebuah transformasi paradigmatis tentang apa arti dan tujuan pendidikan itu sendiri (Mulkhan, 1990). Pendidikan yang sejati bukan hanya tentang transfer informasi dari guru kepada murid, tetapi tentang menghidupkan potensi manusia yang Allah titipkan dalam diri setiap insan.

Inspirasi terkuat datang dari Al-Qur'an sendiri, yang menempatkan membaca (iqra') dan pengetahuan ('ilm) sebagai perintah pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendidikan dalam perspektif Islam sejati adalah proses memanusiakan manusia — membantu setiap individu mengenali potensi akalanya, mengembangkan moralnya, dan menemukan panggilannya sebagai khalifah di muka bumi (Kuntowijoyo, 2008).

2) Dimensi "Mencerdaskan": Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum

Konsep pendidikan yang mencerdaskan menuntut adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemisahan keduanya — yang menjadi ciri khas baik pesantren tradisional maupun sekolah Belanda — dilihat oleh Ahmad Dahlan sebagai sebuah dikotomi yang tidak sehat dan tidak Islami.

Dalam visinya, seorang Muslim yang terdidik dengan baik haruslah mampu memahami Al-Qur'an dan Hadis secara mendalam sekaligus menguasai ilmu-ilmu modern yang diperlukan untuk berkontribusi kepada kemajuan peradaban. Seorang dokter Muslim harus alim dalam agama; seorang ulama harus melek terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial (Nakamura, 1983). Dikotomi antara "ilmu agama" dan "ilmu dunia" adalah — dalam pandangan Ahmad Dahlan — sebuah bid'ah intelektual yang harus ditolak (Nashir, 2010).

3) Dimensi "Membebaskan": Pendidikan sebagai Instrumen Emansipasi

Dimensi ketiga dan yang paling revolusioner dari visi pendidikan yang diusung Muhammadiyah adalah fungsinya sebagai instrumen pembebasan. Pendidikan yang sejati harus mampu membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahl), kemiskinan, dan ketergantungan.

Dalam konteks kolonialisme Belanda, ini berarti bahwa pendidikan harus mampu melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai

bagian dari umat yang bermartabat. Ahmad Dahlan memahami – jauh sebelum para teorisi pendidikan kritis seperti Paulo Freire merumuskannya secara akademis – bahwa pendidikan adalah tindakan politik, bahwa siapa yang menguasai pendidikan akan menguasai masa depan suatu bangsa (Freire et al., 1970).

Oleh karena itu, membangun sekolah bagi Muhammadiyah bukan sekadar amal kebajikan – ia adalah perlawanan strategis terhadap sistem kolonial yang dengan sengaja mempertahankan kebodohan umat Islam sebagai instrumen dominasi.

TEROBOSAN BESAR: KURIKULUM ISMUBA

Integrasi Pendidikan Islam Tradisional dan Modern

Kurikulum ISMUBA (Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab) merupakan salah satu terobosan penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kurikulum ini mencerminkan upaya sistematis untuk menjembatani dua tradisi besar pendidikan: tradisi Islam klasik yang berakar pada pesantren dan lembaga pendidikan tradisional, serta tradisi pendidikan modern yang diperkenalkan oleh sistem pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh negara. Kehadiran kurikulum ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah transformasi pendidikan Islam di Indonesia yang berlangsung sejak awal abad ke-20.

a. Memadukan Pendidikan Islam Tradisional dengan Sistem Pendidikan Modern

Salah satu terobosan utama kurikulum ISMUBA adalah kemampuannya memadukan dua sistem pendidikan yang selama ini berjalan secara paralel dan kerap dianggap saling bertentangan: sistem pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan modern (sekolah pemerintah). Pendidikan Islam tradisional, yang berpusat di pesantren dan surau, menekankan transmisi keilmuan agama secara langsung dari guru kepada murid dalam tradisi halaqah (lingkaran belajar). Sementara itu, sistem sekolah pemerintah yang diperkenalkan oleh Belanda mengadopsi model pendidikan Barat dengan struktur kelas, kurikulum terstandar, dan evaluasi tertulis (Arief & Armai, 2005).

Kurikulum ISMUBA dalam hal ini menjadi wujud institusionalisasi dari cita-cita pemaduan tersebut. Dengan menempatkan Al-Islam (pendidikan keislaman), Kemuhammadiyahan (pendidikan organisasi dan gerakan Islam), serta Bahasa Arab (sebagai pintu masuk keilmuan Islam klasik) sebagai kurikulum tersendiri yang wajib dipelajari di samping mata pelajaran umum, kurikulum ini menciptakan sebuah model pendidikan yang holistik: seorang pelajar tidak hanya menguasai sains dan matematika, tetapi juga memiliki fondasi keislaman yang kokoh.

b. Mengubah Tujuan Pendidikan: Dari Lisan menjadi Tertulis dan Terukur

Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa oleh terobosan kurikulum ISMUBA adalah pergeseran paradigma dalam tujuan dan evaluasi pendidikan Islam: dari tradisi lisan menjadi tradisi tertulis dan terukur. Dalam sistem pendidikan Islam tradisional, penilaian keberhasilan seorang murid sangat bergantung pada penilaian personal sang guru. Seorang murid dianggap telah menguasai suatu bidang ilmu ketika gurunya memberikan ijazah atau sanad – sebuah pengakuan yang bersifat sangat personal dan tidak terstandar secara kelembagaan (Daulay & Putra, 2007).

Kurikulum ISMUBA memperkenalkan sistem evaluasi tertulis dan terukur ke dalam pendidikan Islam. Hal ini berarti kompetensi keislaman seorang siswa kini dapat diukur melalui ujian tertulis, penilaian portofolio, serta standar kompetensi yang jelas dan terukur. Perubahan ini membawa konsekuensi yang sangat signifikan: pertama, memungkinkan standarisasi kualitas pendidikan Islam lintas lembaga;

kedua, memfasilitasi akreditasi dan pengakuan formal atas capaian pendidikan Islam; dan ketiga, menciptakan kesetaraan antara pendidikan agama dan pendidikan umum dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

c. Membentuk Lembaga Madrasah yang Mengintegrasikan Ilmu Agama dan Ilmu Umum

Terobosan ketiga dan yang barangkali paling konkret dari kurikulum ISMUBA adalah kontribusinya dalam membentuk dan mengembangkan lembaga madrasah sebagai institusi pendidikan yang secara sistematis mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kata "madrasah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "sekolah" atau "tempat belajar." Di dunia Islam klasik, madrasah merujuk pada lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengajarkan berbagai cabang ilmu keislaman. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, madrasah bertransformasi menjadi lembaga yang jauh lebih inklusif.

Melalui kurikulum ISMUBA, madrasah—khususnya yang berada di bawah naungan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya—dikembangkan sebagai lembaga yang mengatasi dikotomi tersebut. Para siswa madrasah mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah, dan akhlak sebagai bagian dari kurikulum ISMUBA, sekaligus mendalami matematika, sains, bahasa Indonesia, dan ilmu-ilmu umum lainnya sesuai kurikulum nasional. Model integrasi ini secara resmi mendapat pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyetarakan madrasah dengan sekolah umum.

Integrasi ini bukan tanpa tantangan. Beban kurikulum yang tinggi karena menggabungkan dua sistem sering kali menjadi sorotan para pendidik dan orang tua. Namun, dari perspektif cita-cita pendidikan Islam, integrasi ini merepresentasikan visi yang mulia: melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga kompeten secara intelektual dan profesional dalam berbagai bidang kehidupan modern (Nizar & Samsul, 2007).

PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT PENCERAHAN

Integrasi Wahyu Teks, Wahyu Natural, dan Penguasaan IPTEKS untuk Kepentingan Kemanusiaan

Visi pencerahan ini mencakup tiga pilar utama yang saling berkelindan: pertama, pendirian epistemologi pendidikan di atas dua sumber wahyu — teks (Al-Qur'an dan Sunnah) dan alam semesta; kedua, pembentukan manusia paripurna yang beriman, alim, berpandangan luas, dan siap berjuang; serta ketiga, pengintegrasian spiritualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) demi kepentingan kemanusiaan yang universal.

Pendidikan Berbasis Wahyu Teks dan Wahyu Natural (Alam Semesta)

a. Wahyu Teks sebagai Fondasi Epistemologi

Wahyu teks dalam konteks pendidikan Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pengetahuan yang bersifat qath'i (pasti) dan mutlak. Dalam tradisi epistemologi Islam, Al-Qur'an dipandang bukan sekadar kitab ritual keagamaan, melainkan sebuah panduan komprehensif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia — dari akidah, ibadah, muamalah, hingga etika sains dan pembangunan peradaban. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi seluruh manusia),

yang berarti muatan epistemologinya tidak terbatas pada ranah spiritual semata, tetapi mencakup panduan untuk memahami realitas alam dan sosial.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, salah satu filsuf pendidikan Islam terkemuka abad ke-20, memperkenalkan konsep Ta'dib sebagai konsep inti pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu teks. Bagi Al-Attas, ta'dib lebih tepat menggambarkan tujuan pendidikan Islam dibanding sekadar tarbiyah atau ta'lim, karena ta'dib mengandung dimensi penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar – suatu proses yang menuntut landasan wahyu sebagai tolok ukur kebenaran (Steenbrink & Karel A, 1992).

b. Wahyu Natural: Alam Semesta sebagai Ayat yang Terbentang

Di samping wahyu teks, Islam mengenal konsep wahyu natural – yakni alam semesta sebagai ayat kauniyyah (tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di jagat raya). Al-Qur'an berkali-kali mendorong manusia untuk melakukan pengamatan dan perenungan terhadap fenomena alam sebagai jalan mengenal kebesaran Tuhan (QS. Ali Imran: 190-191; QS. Ghasyiyah: 17-20). Dalam paradigma ini, sains dan ilmu pengetahuan alam bukan sekadar kegiatan intelektual profan, melainkan merupakan bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT melalui pembacaan ayat-ayat-Nya yang terhampar di alam semesta (Kementerian Agama RI, 2004).

Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan dua wahyu ini memiliki cakupan epistemologis yang jauh lebih luas dibandingkan pendidikan sekuler maupun pendidikan agama yang bersifat sempit. Pendidikan berbasis wahyu ganda ini mengajarkan kepada siswa bahwa membaca Al-Qur'an dan membaca gejala alam adalah dua aktivitas yang saling melengkapi dan memperkuat keyakinan tauhid.

Mengintegrasikan Spiritualitas dengan Penguasaan IPTEKS untuk Kepentingan Kemanusiaan

a. Paradigma Integrasi: Menolak Dikotomi Ilmu

Integrasi spiritualitas dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) merupakan jantung dari visi pendidikan Islam sebagai alat pencerahan. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, yang merupakan warisan dari sistem kolonial Belanda dan diperkuat oleh sekularisme modern, sesungguhnya bertentangan dengan tradisi intelektual Islam yang autentik. Dalam peradaban Islam klasik, tidak dikenal pemisahan antara sains dan agama; para ulama besar adalah sekaligus ahli fikih, filosof, dokter, matematikawan, dan astronom. Muhaimin menegaskan bahwa paradigma pendidikan Islam yang benar harus menolak dikotomi ilmu ini dan menggantinya dengan paradigma tauhidik yang memandang seluruh ilmu sebagai satu kesatuan yang bersumber dari Yang Maha Tunggal.

b. IPTEKS dalam Bingkai Nilai-Nilai Qur'ani

Penguasaan IPTEKS dalam konteks pendidikan Islam tidak berarti penerimaan sains dan teknologi secara buta tanpa filter nilai. Sebaliknya, IPTEKS harus dikuasai, dikembangkan, dan diterapkan dalam bingkai nilai-nilai Al-Qur'an dan etika Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan sosial, dan kelestarian alam. Imam Suprayogo melalui gagasan pohon ilmu di UIN Malang mengilustrasikan bahwa ilmu pengetahuan Islam yang ideal bagaikan pohon yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, berbatang pada ilmu-ilmu keislaman klasik, dan berbuah pada penguasaan IPTEKS modern yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Tanpa akar wahyu yang kuat, penguasaan IPTEKS akan menghasilkan saintis dan teknolog yang tidak

bermoral; sebaliknya, tanpa penguasaan IPTEKS, spiritualitas tidak mampu menjawab tantangan peradaban modern (Al-Faruqi & Ismail Raji, 1995; Mizan, 1994).

c. Orientasi Kemanusiaan: IPTEKS sebagai Instrumen Kemashlahatan

Muara dari seluruh proses integrasi ini adalah orientasi kemanusiaan yang universal. IPTEKS yang dikuasai dan dikembangkan dalam bingkai spiritual Islam harus diarahkan untuk mewujudkan masalah al-'ammah (kemashlahatan umum) bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan. Kuntowijoyo, sosiolog Muslim Indonesia, menyebut orientasi ini sebagai humanisme teosentris – sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian praktis (subyek perjuangan dan pemberdayaan) namun dengan Tuhan sebagai pusat orientasi nilainya. Berbeda dari humanisme sekuler yang antroposentris, humanisme teosentris ini memastikan bahwa pengabdian kepada kemanusiaan tidak terlepas dari pengabdian kepada Sang Pencipta manusia itu sendiri.⁶⁹

GERAKAN SOSIAL: DAKWAHYANGMENYENTUH

Gerakan Al-Ma'un, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lahirnya 'Aisyiyah sebagai Ruang Publik Perempuan

Dakwah Islam dalam pengertian konvensional kerap diasosiasikan dengan ceramah di atas mimbar, pengajian di masjid, atau khotbah Jumat yang bersifat ritual dan verbal. Namun, gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah pada awal abad ke-20 menawarkan paradigma dakwah yang jauh lebih bumi dan menyentuh: dakwah sebagai aksi sosial nyata yang langsung menjawab kebutuhan kaum tertindas, miskin, dan terlantar. Paradigma ini bersumber dari sebuah pembacaan ulang yang radikal terhadap Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'un (QS. 107), yang kemudian melahirkan sebuah gerakan sosial yang mengubah wajah Islam Indonesia secara fundamental (Kuntowijoyo, 2008; Langgugung & Hasan, 1986; Marimba & Ahmad D, 1989).

Tiga terobosan utama dari gerakan dakwah sosial ini layak dikaji secara mendalam: pertama, gerakan Al-Ma'un sebagai manifestasi kepedulian nyata terhadap anak yatim dan fakir miskin; kedua, transformasi dari dakwah ritual menuju pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan; dan ketiga, pembukaan ruang publik bagi perempuan melalui lahirnya organisasi 'Aisyiyah yang menjadi salah satu gerakan perempuan Islam terbesar di dunia.

Membuka Ruang Publik bagi Perempuan: Lahirnya 'Aisyiyah

a. Konteks Historis: Perempuan dalam Belenggu Tradisi

Pada awal abad ke-20, perempuan Jawa – dan perempuan Muslim Indonesia pada umumnya – hidup dalam lingkaran konsentris belenggu: belenggu budaya yang mengurung mereka dalam ranah domestik, belenggu tafsir agama yang menafsirkan teks-teks Islam secara patriarkal untuk membenarkan subordinasi perempuan, dan belenggu sistem kolonial yang menutup akses pendidikan dan ruang publik bagi kaum pribumi, terutama perempuan. Dalam konteks yang sangat membatasi ini, gagasan bahwa perempuan Muslim harus memiliki organisasi mandiri, mengadakan pertemuan publik, dan terlibat aktif dalam gerakan sosial merupakan sebuah revolusi kultural yang tidak dapat diremehkan.

b. Kelahiran 'Aisyiyah: Revolusi dalam Diam

'Aisyiyah didirikan pada 22 April 1917 (27 Rajab 1335 H) di Yogyakarta, hanya lima tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Nama 'Aisyiyah dipilih sebagai penghormatan kepada 'Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai perempuan paling terpelajar, paling berani, dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam awal – sosok yang menjadi rujukan ribuan hadis dan guru bagi para sahabat laki-laki. Pemilihan nama ini sendiri merupakan sebuah pernyataan teologis: bahwa perempuan Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi intelektual, pendidik, dan pemimpin dalam masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh 'Aisyah r.a. (Nashir & Haedar, 2010).

Peran Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah) sebagai pendiri dan pemimpin pertama 'Aisyiyah sangat sentral. Sebagai istri KH. Ahmad Dahlan, ia bukan sekadar pendukung pasif dari gerakan suaminya, melainkan seorang tokoh yang memiliki visi dan keberanian tersendiri untuk mengorganisasi perempuan-perempuan Muslim Yogyakarta keluar dari ruang domestik dan ke dalam arena gerakan sosial Islam. Siti Chamamah Soeratno mencatat bahwa keberhasilan 'Aisyiyah menjadi organisasi perempuan Islam yang mandiri dan berpengaruh tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan Nyai Dahlan yang mampu memadukan nilai-nilai keislaman yang otentik dengan semangat pemberdayaan perempuan yang progresif.

c. Ruang Publik Perempuan: Melampaui Batas Domestik

Kontribusi 'Aisyiyah dalam membuka ruang publik bagi perempuan Muslim Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, dimensi pendidikan: 'Aisyiyah mendirikan sekolah khusus perempuan yang memberikan akses pendidikan formal bagi anak-anak perempuan yang selama ini dikecualikan dari sistem pendidikan. Kedua, dimensi kesehatan: 'Aisyiyah mendirikan klinik dan layanan kesehatan ibu dan anak yang menjangkau perempuan-perempuan dari keluarga tidak mampu. Ketiga, dimensi sosial: 'Aisyiyah mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengajian, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari pembangunan (Noer & Deliar, 1994).

Lebih dari sekadar organisasi sosial, 'Aisyiyah membuka perdebatan teologis yang sangat penting tentang posisi perempuan dalam Islam. Dengan membuktikan secara empiris bahwa perempuan Muslim mampu mengelola organisasi, mendirikan lembaga pendidikan dan kesehatan, serta berperan aktif dalam kehidupan publik tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, 'Aisyiyah memberikan sanggahan praktis terhadap tafsir-tafsir patriarkal yang mengurung perempuan dalam batas-batas domestik atas nama agama. Dalam catatan sejarahnya, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah mencatat bahwa hingga memasuki abad ke-21, organisasi ini telah mengelola ribuan sekolah, ratusan rumah sakit dan klinik, serta berbagai lembaga sosial yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia – sebuah capaian yang menempatkan 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia.

Relevansi Kontemporer: Dakwah Sosial di Era Modern

Paradigma dakwah sosial yang dipelopori oleh gerakan Al-Ma'un dan 'Aisyiyah memiliki relevansi yang sangat kuat di era modern. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan berbagai persoalan sosial – kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi gender, dan marginalisasi kelompok-kelompok rentan –

pesan inti dari gerakan ini tetap segar dan mendesak: bahwa keislaman sejati tidak dapat dipisahkan dari kepedulian sosial yang nyata dan terorganisasi.

Di era digital dan globalisasi, tantangan gerakan dakwah sosial semakin kompleks. Kemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kemiskinan akses informasi, kemiskinan pendidikan berkualitas, dan kemiskinan kesehatan. Sementara diskriminasi terhadap perempuan kini juga merambah ruang-ruang digital dalam bentuk kekerasan berbasis *gender daring* dan *hate speech*. Warisan gerakan Al-Ma'un dan 'Aisyiyah menginspirasi generasi Muslim kontemporer untuk terus berinovasi dalam bentuk-bentuk kepedulian sosial yang relevan dengan tantangan zaman, dengan tetap berpijak pada fondasi tauhid dan nilai-nilai Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ahmad Dahlan tetap relevan untuk menjawab tantangan pendidikan Islam di era digital, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan pendidikan tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental keislaman.

PERAN KH. Ahmad Dahlan SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

a. MendobrakKejumudanBerpikirMenujuKemodernanyangBerkeadaban

K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923) lahir di Kauman, Yogyakarta dengan nama kecil Muhammad Darwisy, adalah tokoh pembaruan Islam yang mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961 atas jasanya memelopori kebangkitan umat Islam Indonesia (Abdullah, 2015).

Muhammadiyah diberi label sebagai gerakan Islam modernis, reformis, dan pembaruan karena melakukan langkah modernisasi dalam pemahaman dan pembinaan keagamaan. Salah satu semboyan Ahmad Dahlan yang terkenal: "Jangan cari penghasilan di Muhammadiyah, tetapi hidup-hidupilah Muhammadiyah" (Nuzula, 2021).

b. MembentengiUmatdariAncamanLuarMelaluiPendidikanBerkualitas

Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap kondisi umat Islam masa kolonial Belanda yang mengalami kemunduran dalam pendidikan, ekonomi, dan spiritual. Salah satu tantangan besar saat itu adalah misi Kristenisasi yang menggunakan sekolah dan rumah sakit sebagai alat penyebaran agama Kristen, sehingga banyak pribumi yang dituduh masuk Kristen jika bersekolah di sekolah Belanda.

Ahmad Dahlan menyadari pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran umat, sehingga fokus utama Muhammadiyah adalah pengembangan lembaga pendidikan modern yang menggabungkan pendidikan agama dan umum. Pada tahun 1912, ia mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyah (sekolah modern pertama) dengan kurikulum yang memadukan pelajaran agama dan umum, yang awalnya menempati ruang tamu berukuran 6×2,5 meter dengan 9 murid.

Upaya utama Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dilakukan melalui reformasi kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum pemerintah dengan memperbanyak alokasi waktu mata pelajaran Agama (al-Islam). Hingga saat ini, Muhammadiyah memiliki ribuan institusi pendidikan mulai dari sekolah hingga universitas Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) pada 1918 untuk membantu orang miskin dan yatim piatu, serta

organisasi wanita Aisyiyah (1918) yang memelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengenyam pendidikan setingkat dengan kaum pria.

c. Mengedepankan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai Wujud Ibadah

Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaruan pendidikan yang mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan lebih modern. Golongan pembaharu seperti Muhammadiyah berpendapat bahwa Islam menghargai akal manusia dan tidak menghambat usaha mencari ilmu pengetahuan serta perkembangan sains. Para pembaharu bersedia mencontoh apa pun dari siapapun yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, termasuk meniru pemikiran Barat dan sistem pendidikan modern. Mereka mengajarkan bahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman di sekolah-sekolah Islam, serta mengganti tulisan Arab Pegon dengan huruf Latin.

Muhammadiyah disebut sebagai agen of social change (kekuatan perantara sekaligus pelaku perubahan sosial) oleh Dr. Alfian. Prinsip utama pembaharu adalah pembukaan pintu ijtihad (berpikir kritis) dan penolakan taklid, di mana semua fatwa harus dinilai dengan dasar Al-Qur'an dan Al-Hadis (Noer, 1985).

Fokus penelitian pendidikan progresif Islam dalam Muhammadiyah menekankan integrasi agama dan sains, yang menunjukkan bahwa mencari ilmu pengetahuan adalah wujud ibadah.

WARISAN BAGI BANGSA

Kiprah KH. Ahmad Dahlan Jadikannya Pahlawan Nasional Indonesia

Pada tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia menyematkan gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Ahmad Dahlan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961 tertanggal 27 Desember atas jasa-jasa beliau dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan.

Ahmad Dahlan adalah ulama Tanah Air yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional karena banyak melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan dan pergerakan Islam Indonesia. Beliau dipandang sebagai tokoh pembaharuan Muhammadiyah karena berusaha mengembalikan semuanya ke sumber Islam (Al-Quran dan Hadis) (Kompas, 2022).

Sejarah mencatat KH. Ahmad Dahlan sebagai tokoh pembaharu dalam pergerakan Islam Indonesia karena ia mengambil peran dalam pendidikan Islam dengan pendekatan yang terbilang modern. Kiprah beliau dalam pendidikan Islam menjadi jalan untuk melawan Belanda secara halus, dengan prinsip mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.

Sistem Pendidikan Muhammadiyah Kini Menjadi Pilar Kemajuan Peradaban Bangsa

Dalam bidang pendidikan, KH. Ahmad Dahlan telah berhasil menciptakan model sekolah yang berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu umum yang merupakan benih dari sekolah Islam modern di Indonesia. Keunggulan dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah adalah isi dari penyampaian keilmuannya, di mana lembaga ini tidak hanya memasukkan mata pelajaran yang bersifat agama tetapi juga ilmu umum.

Aktualisasi teologi al-Ma'un dalam sistem Pendidikan Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan Pendidikan bagi warga bangsa tanpa membedakan latar belakang. Pendidikan Muhammadiyah menekankan integrasi agama dan sains, yang menunjukkan bahwa mencari ilmu pengetahuan adalah wujud ibadah.

Hingga saat ini, Muhammadiyah memiliki ribuan institusi pendidikan mulai dari sekolah hingga universitas Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah telah membuka beberapa perguruan tinggi di luar negeri, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengubah Nasib Bangsa Terjajah Menjadi Bangsa Pembelajar yang Berdaya Saing

KH. Ahmad Dahlan melakukan pembaruan dalam kurikulum dan metode pengajaran dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam pendidikan lembaga pendidikan Islam, serta mengadopsi sistem kurikulum Belanda dengan nilai-nilai agama. Metode pengajaran menggunakan sistem klasikal dengan materi belajar terstruktur sesuai jenjang pendidikan dari masing-masing kelas, berbeda dengan yang ada di pesantren (Aksara, 2025).

Terobosan lain yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan terlihat di bidang kelembagaan dan sarana dan prasarana, di mana ia mengangkat citra pendidikan Islam yang awalnya bersifat nonformal menjadi sekolah formal. Secara kelembagaan, sekolah ini setara dengan sekolah-sekolah Belanda, dan lulusannya tak hanya diakui oleh masyarakat, tetapi juga mendapat pengakuan secara hukum di hadapan pemerintah.

KH. Ahmad Dahlan juga mengembangkan pendidikan lintas iman, di mana ia mengizinkan murid-murid OSVIA Magelang yang beragama Kristen untuk mengikuti pendidikan agama Islam sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan kepribadian terbuka beliau yang tidak hanya berkawan dengan kalangan Muslim tetapi juga dengan para misionaris dan zending.

Muhammadiyah disebut sebagai agen of social change (kekuatan perantara sekaligus pelaku perubahan sosial) oleh Dr. Alfian. Gerakan beliau mengangkat umat dari gelapnya kebodohan menjadi masyarakat yang beradab.

KESIMPULAN

KH. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa hakikat pendidikan Islam tidak berhenti pada penguasaan ilmu, tetapi harus diwujudkan dalam amal nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai klasik dengan pendekatan modern menghasilkan model pendidikan Islam yang holistik, adaptif, dan kontekstual. Prinsip *berilmu amaliah, beramal ilmiah* menjadi fondasi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama, ilmu umum, pembentukan karakter, dan kepedulian sosial. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka konseptual bagi pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif terhadap tantangan zaman. Pemikiran beliau tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman karena mendorong lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, berpikiran terbuka, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan melalui pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

REKOMENDASI

Nilai-nilai pendidikan yang diwariskan KH. Ahmad Dahlan perlu terus diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam melalui penguatan integrasi antara ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan praktik nyata di masyarakat. Lembaga pendidikan diharapkan mengembangkan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengamalkan ilmu secara bertanggung jawab melalui kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Selain itu, pendidik perlu menanamkan prinsip *berilmu amaliah, beramal ilmiah* sebagai landasan pembentukan generasi yang berakhlak, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

REFERENSI

- Abdullah, M. R. (2015). Metode penelitian kuantitatif.
- Ahmad, H. J. (2025). Rekonstruksi Karakter Kepedulian Siswa Melalui Pendekatan Qur'ani: Implementasi Surah Al-Ma'un di SD Terpadu Muhammadiyah 1 Besuki. *IHSAN: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Islam*, 1(2), 83-90. <https://doi.org/10.66031/ihsan.v1i2.124>
- Akhyar, M., & Kosim, M. (2024). Gagasan pembaharuan pendidikan Islam berkemajuan perspektif KH Ahmad Dahlan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 1-19. <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.379>
- Aksara, M. Kompilasi Karya Buku Aksara Global Akademia Periode 2021–2025: Identifikasi Arah Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Strategi Nasional.
- Al-Faruqi, I. R. (1995). *Triologue of the Abrahamic faiths*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Gadjah Mada University Press.
- Amrullah, A. K. (1982). *Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera*. Umminda.
- Arief, A., & Azra, A. (2005). Reformulasi Pendidikan Islam. (No Title).
- Aritonang, A. A., Zulkarnain, A. N. B. I., & Irmayani, N. (2025). Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial: Dari Masa Kolonial Hingga Era Reformasi. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(1), 10-25.
- Azra, A. (1999). The Transmission of al-Manar's Reformism to the Malay-Indonesian World: The Cases of al-Imam and al-Munir. *Studia Islamika*, 6(3).
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media.
- Bruinessen, M. V. (1995). Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. (No Title).
- Darwis, M., Zuhdiah, Z., & Rama, B. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam KH Ahmad Dahlan Dan KH Hasyim Asy'ari. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 60-66.
- Daulay, H. H. P. (2016). *Pemberdayaan pendidikan agama Islam di sekolah*. Prenada Media.
- Freire, P. (1970). Cultural action and conscientization. *Harvard educational review*, 40(3), 452-477. <https://doi.org/10.17763/haer.40.3.h76250x720j43175>

- Gouda, M. G. (1995, September). The triumph and tribulation of system stabilization. In *International Workshop on Distributed Algorithms* (pp. 1-18). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/BFb0022135>
- Hadikusuma, D. (1980). *Matahari-Matahari Muhammadiyah*. Persatuan.
- Halik, A. C., Susmihara, S., & Hasaruddin, H. (2024). Kontribusi KH Ahmad Dahlan dalam Reformasi Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4623-4635.
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age 1798–1939*. Cambridge University Press.
- Ihsan, R. F., Larasati, S. I., & Hidayah, A. N. (2024). SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MUHAMMADIYAH. *Tarim: Jurnal Islamic Education*, 2(1), 27-32.
- Kartodirdjo, S. (1990). jolkanlah kerangka struktural yang mencakup pelbagai perubahan hubungan dan interaksi sosial beserta transformasi struktural yang. *Prospek pedesaan*, 15.
- Keddie, N. R. (1973). Sayyid Jamāl ad-Dīn "al-Afghānī": a political biography.
- Kuntowijoyo, P., & AE, M. (2008). Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi. (No Title).
- Langgulang, H. (1986). Manusia dan pendidikan: Suatu analisa psikologi, filsafat dan pendidikan. (No Title).
- Maarif, A. S. (1985). Islam dan masalah kenegaraan: studi tentang percaturan dalam konstituante. (No Title).
- Marimba, A. D., & Islam, P. F. P. (1989). Bandung: Pt. Al-Maarif Bandung.
- Marsudi, M. S., & Zayadi, Z. (2021). Gerakan Progresif Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan Di Indonesia. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(2), 160-179. <https://doi.org/10.32923/maw.v12i2.2035>
- Mizan, A. N. (1994). Family power studies: Some major methodological issues. *International Journal of Sociology of the Family*, 24(2), 85-91.
- Mohammad, H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*. Gema Insani.
- Muhammadiyah, P. P. (2005). *Anggaran Dasar Muhammadiyah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mulkhan, A. M. (1990). Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial. (No Title).
- Nakamura, M. (1976). *The crescent arises over the banyan tree: a study of the Muhammadiyah movement in a Central Javanese town*. Cornell University.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah gerakan pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Nizar, S. (2007). Sejarah pendidikan Islam: Menelusuri jejak sejarah pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia. (No Title).
- Noer, D. (1994). Gerakan Modernisme Islam di Indonesia. *LP3ES, Jakarta*.
- Noer, T. J. (1985). Cold War and Black Liberation: The United States and White Rule in Africa, 1948-1968.
- Nuzula, N. F. (2021, January). The influence of environmental cost on profitability and firm value. In *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*.

- Sari, P. I., Ramdhani, N., & Rusli, R. (2026). Analisis Komparatif Dasar Filosofis Pendidikan Islam dan Filsafat Barat: Studi Pustaka tentang Tujuan dan Hakikat Pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 150-163. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.47522>
- Sholihin, M. M. (2025). DINAMIKA IJTIHAD DAN BERMADZHAB DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU AGAMA, SOSIAL, DAN HUKUM: Suyyirah, M. Muchlis Sholihin, Maysurah (3). *JURNAL CERDAS HUKUM*, 3(2), 231-258.
- Steenbrink, K. (1992). On the Possibility of a Creative and Inspiring Pluralism of Religions. *Mission Studies*, 9(1), 156-167.
- Sugiyono, S. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. *Yogyakarta: Auareta*.
- Suliyanto, S. D., Maulina, S., & Amrillah, R. (2023). Konsep Pendidikan Islam Menurut K.H. Ahmad Dahlan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3).
- Van der Wal, D. (1998). Effects of fetch and surface texture on aeolian sand transport on two nourished beaches. *Journal of Arid Environments*, 39(3), 533-547. <https://doi.org/10.1006/jare.1997.0364>
- Yusuf, M. Y. (1990). *Corak pemikiran kalam tafsir Al-Azhar: sebuah telaah tentang pemikiran Hamka dalam teologi Islam*. Pustaka Panjimas.